



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 26 April 2016

Halaman: 10

Penyelesaian Perizinan Lebih Lambat dari Timor Leste



OTONOMI DAERAH – Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar upacara Peringatan Hari Otonomi daerah di halaman Balai Kota Timoho, Jogja, Senin (25/4).

UMBULHARJO – Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016 ini membuat tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia menjadi semakin berat. Bertakutnya lima arus bebas dalam aktivitas ekonomi antar negara ASEAN menjadikan Bangsa Indonesia harus bersungguh-sungguh dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap bersaing di tanah regional Asia Tenggara.

Dalam kondisi seperti ini, otonomi daerah beserta regulasinya dirasa memiliki peran penting dalam membentuk efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara di bidang ekonomi sehingga perlu adanya penataan dan penantapan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Pemerintah Daerah.

"Otonomi Daerah telah menjadi komitmen dan konsensus para pendiri bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pengembangan demokrasi lokal. Seiring dengan telah diberlakukannya MEA pada tahun 2016 ini, seluruh pemerintah daerah harus menata seluruh elemen otonomi daerah agar Indonesia tidak menjadi penonton dalam era persaingan bebas tersebut," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Tintin Sulastri saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjoe Kurnolo dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XX di Halaman Balai Kota Timoho, Jogja, Senin (25/4).

Dikatakan, daya saing Indonesia saat ini masih berada di bawah beberapa negara ASEAN. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), dari hasil survey yang dilakukan terhadap 144 negara, daya saing Indonesia berada di peringkat ke-37, masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Selain itu survey lain yang dilakukan oleh International Finance Cooperation (IFC) World Bank menunjukkan bahwa penyelesaian perizinan di Indonesia masih dianggap lambat, yakni membutuhkan waktu rata-rata 52,5 hari, jauh berada di bawah Vietnam (34 hari), Thailand (27,5) hari, Timor Leste (10 hari), Malaysia (5,5 hari) dan Singapura (2,5 hari).

Menurutnya, gambaran yang didapat dari survey tersebut menunjukkan masih kurang adanya regulasi yang menghambat proses perizinan sehingga berdampak buruk pada investasi.

"Terdapat 42.633 Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih dan 3.000 Peraturan Daerah yang harus dibatalkan Tahun 2016. Oleh karena itu saya minta kepada para Gubernur, Bupati, Walikota bersama dengan DPRD untuk menindaklanjuti pembatalan Perda di daerah masing-masing, khususnya Perda yang menghambat investasi dan perizinan," tuturnya.

Hari Otonomi Daerah sendiri merupakan agenda Tahunan yang diselenggarakan baik di pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam rangka memasyarakatkan serta memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada penyelenggaraannya yang ke-XX di Kota Yogyakarta, pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah berlangsung cukup menarik, pasalnya seluruh petugas upacara berasal dari jajaran Lurah di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan semangat pelimpahan kewenangan yang merepresentasikan kootonomian daerah. (*/fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Bag. Tapem</u>	☐ Negatif	☐ Amat Se
2.	☐ Positif	☐ Seger
3.	☒ Netral	☒ Biasa
4.		
5.		

v Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005